

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SDN 004 BELILAS KELURAHAN
PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

NAMA : FITRI HANDAYANI
NOMOR MAHASISWA : 197122120
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2023**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SDN 004 BELILAS KELURAHAN
PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

TESIS

Oleh :

FITRI HANDAYANI

NPM : 197122120

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si.

Anggota

Anggota


Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si.


Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SDN 004 BELILAS KELURAHAN
PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

TESIS

Nama : FITRI HANDAYANI
NPM : 197122120
Program Studi : Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I  Pekanbaru, _____ 2023

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Pembimbing II  Pekanbaru, _____ 2023

Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau


Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos, M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Administrasi peserta ujian konferehensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI HANDAYANI
NPM : 197122120
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2023
Pelaku Pernyataan,



Fitri Handayani



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 308/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **FITRI HANDAYANI**
NPM : **197122120**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 27 September 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos, M.Si

Pekanbaru, 20 Desember 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 27-Sep-2022 10:53 WIB
ID: 1910105118
Word Count: 21526
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
23%	Internet Sources: 24% Publications: 7% Student Papers: 8%

IMPLEMENTASI PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SDN 004
BELILAS KELURAHAN

PANGKALAN KASAI
KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI
HULU By Fitri Handayani

7% match (Internet from 15-Nov-2020)

<https://core.ac.uk/download/pdf/300875942.pdf>

2% match (Internet from 24-Aug-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8268/1/197121049.pdf>

1% match (Internet from 08-Sep-2022)

<https://repository.uir.ac.id/9938/1/177122090.pdf>

1% match (Internet from 26-Jul-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8324/1/177121019.pdf>

1% match (Internet from 09-Jul-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8280/1/187122088.pdf>

1% match (Internet from 29-Jul-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8214/1/177121047.pdf>

1% match (Internet from 31-Aug-2022)

<http://repository.uir.ac.id/1709/1/187121025.pdf>

1% match (Internet from 25-Jun-2022)

<https://repository.uir.ac.id/9929/1/177121008.pdf>

1% match (Internet from 12-Nov-2020)

<https://konsultasiskripsi.com/tag/ilmu-politik/page/2/>

1% match (Internet from 24-Feb-2021)

<https://konsultasiskripsi.com/tag/judul-psikologi/page/2/>

1% match (Internet from 15-Jan-2021)

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1200/5/131801048_file%205.pdf

1% match (Internet from 12-Oct-2018)

<http://eprints.walisongo.ac.id/5279/1/101311042.pdf>

1% match (Internet from 04-Apr-2021)

<http://repository.uinbanten.ac.id/3728/3/BAB%20I-5.docx>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 244/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

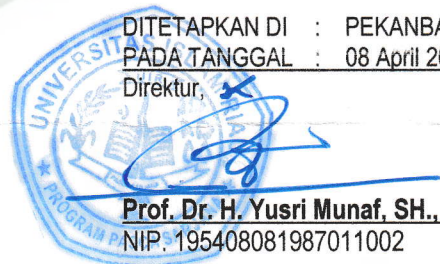
Nama : **FITRI HANDAYANI**
N P M : **197122120**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**
Judul Tesis : **"IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN 004 BELILAS KELURAHAN PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 08 April 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”** Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang administrasi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.

8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

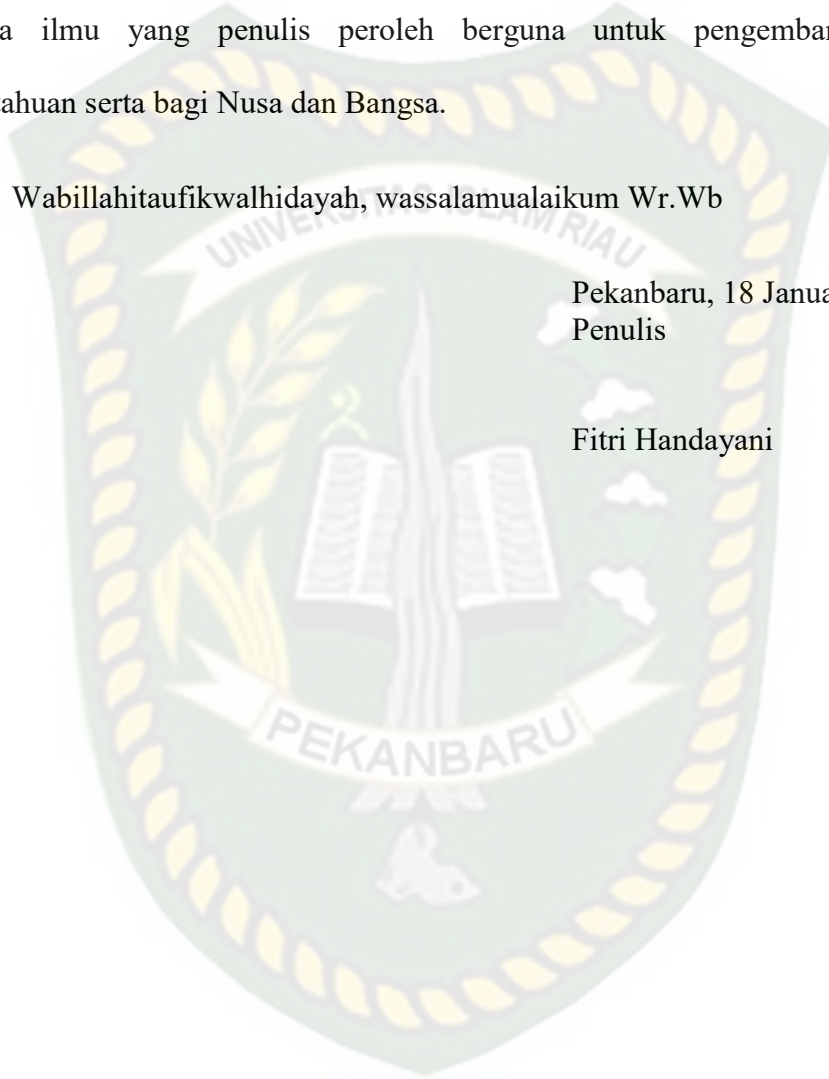
Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 18 Januari 2023

Penulis

Fitri Handayani



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ASBTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan Penelitian.....	20
1.4. Manfaat Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS	22
2.1. Tinjauan Pustaka	22
2.1.1. Konsep Administrasi.....	22
2.1.2. Konsep Organisasi	24
2.1.3. Konsep Manajemen.....	29
2.1.4. Konsep Kebijakan	35
2.1.5. Konsep Implementasi Kebijakan	41
2.1.6. Konsep Program Bantuan Pendidikan	57
2.1.7. Konsep Bantuan Operasional Sekolah	58
2.2. Penelitian Terdahulu	66
2.3. Kerangka Pemikiran	75
2.4. Konsep Operasional	76
2.5. Operasional Variabel.....	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	80
3.1. Tipe Penelitian	80
3.2. Lokasi Penelitian.....	81
3.3. Informan Penelitian.....	81
3.4. Teknik Penetapan Informan	82
3.5. Jenis dan Sumber Data	83
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	83
3.7. Teknik Analisa Data.....	85
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian	87
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	89
4.1. Kabupaten Indragiri Hulu.....	89

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
5.1. Identitas Informan	95
5.2. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	97
5.3. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	129
BAB VI PENUTUP	130
6.1. Kesimpulan.....	130
6.2. Saran.....	131
DAFTAR KEPUSTAKAAN	134



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu....	67
II.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	79
III.1	Jumlah Informan Pada Penelitian Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu....	82
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	76



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DI SDN 004 BELILAS KELURAHAN PANGKALAN KASAI
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Oleh

FITRI HANDAYANI

Selama ini pemerintah selalu berusaha untuk memecahkan masalah pendidikan yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan suatu akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang implementasinya difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat. Tujuan utama program Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah anggota masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu untuk memenuhi biaya operasional sekolah, juga memberikan layanan pendidikan terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin. Tujuan utama penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun indikator penelitian adalah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 7 orang dengan Kepala Sekolah SDN 004 Belilas sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu belum maksimal. Dengan faktor penghambat faktor-faktor yaitu kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS, adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah.

**IMPLEMENTATION OF THE SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE
PROGRAM (BOS) AT SDN 004 BELILAS KELURAHAN
PANGKALAN KASAI, SEBERIDA DISTRICT
INDRAGIRI HULU DISTRICT**

ABSTRACT

By
FITRI HANDAYANI

So far, the government has always tried to solve the problems of education that occurred. One of the efforts made by the government to improve public access to quality education, which received a large enough budget allocation is the School Operational Assistance (BOS) program. The School Operational Assistance Program (BOS) in Law number 20 of 2003 article 34 paragraph 2 states that the central and regional governments guarantee the implementation of compulsory education at the basic level without charging fees. The Ministry of Education and Culture has launched a Universal Secondary Education (PMU) policy. whose implementation is focused on providing opportunities for the entire community. The main objective of the Universal Secondary Education (PMU) program is that members of the community who are economically unable to meet school operational costs, also provide affordable and quality education services, especially for poor students. The main purpose of this study was to identify and analyze the implementation of the School Operational Assistance Program (BOS) at SDN 004 Belilas, Pangkalan Kasai Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. The research indicators are Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This type of research is descriptive qualitative. The number of research informants was 7 people with the Principal of SDN 004 Belilas as the key informant. Data collection techniques with interviews and data analysis in this study used data analysis techniques on the site developed by Miles Huberman. The results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of the School Operational Assistance Program (BOS) at SDN 004 Belilas, Pangkalan Kasai Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency has not been maximized. With the inhibiting factors, namely the lack of participation of the School Committee in the implementation of the BOS policy, the delay in disbursing funds, it tends to make it difficult for many schools to meet their operational needs and delay the payment of teacher salaries or are forced to owe to various parties.

Keywords: Implementation, School Operational Assistance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa.

Tujuan suatu Pendidikan menurut Undang-undang pasal 3 nomor 20 tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dalam pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sedikitpun. Dalam pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Kosekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban memberikan layanan

dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Seperti yang dipaparkan diatas bahwa Sistem Pendidikan menurut Undang - undang Republik Indonesia nomer 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran Negara dalam hal tersebut adalah memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah nomer 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri dari tiga biaya, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

Biaya yang dimaksud menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP), antara lain biaya investasi investasi yang dimaksud adalah suatu biaya yang meliputi biaya penyediaan sarana prasarana dan pengembangan sumberdaya manusia ataupun modal kerja tetap, biaya operasional yang dimaksud adalah suatu biaya yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kerja pendidik serta segala tunjangan yang melekat pada, sedangkan biaya personal yang dimaksud adalah suatu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan Biaya pendidikan sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana cara mencukupi kebutuhan investasi,

operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selama ini pemerintah selalu berusaha untuk memecahkan masalah pendidikan yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan suatu akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang implementasinya difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat. Tujuan utama program Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah anggota masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu untuk memenuhi biaya operasional sekolah, juga memberikan layanan pendidikan terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin.

Kebijakan dana BOS diawali dari adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu

program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain.

Pada prinsipnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasarannya yaitu siswa-siswi yang berhak atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu peserta didik yang kurang mampu atau tidak mampu. Pemberian dana operasional sekolah yang tidak tepat sasarannya sama saja membuang uang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut, masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran BOS.

Dana BOS adalah program pemerintahan yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain, dan dana BOS ini dikelola langsung oleh Sekolah karena dana BOS ini ditransfer dari Dinas Pendidikan Provinsi ke Sekolah secara online. Dengan BOS siswa diharapkan dapat

memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi Indonesia.

Dengan melihat tujuan dari pemberian dana BOS adalah peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka perlu diketahui berapa besar peranan yang ditimbulkan dengan adanya dana bos bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri ini. Mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Alur pengelolaan Dana BOS terdiri dari 3 tahap yang nantinya akan bermuara pada satu output yang berupa dampak implementasi pengelolaan dana BOS. Ketiga dampak tersebut antara lain :

1. Perencanaan

- a. Melakukan evaluasi dari sekolah, dengan cara mengisi instrument evaluasi diri terhadap pencapaian 8 SNP dilanjutkan dengan membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
- b. Mengisi dan mengirimkan data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS01B dan BOS-01C) secara lengkap dan akurat yang kemudian dikirimkan secara online.
- c. Membentuk Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah.
- d. Melakukan sosialisasi Juknis BOS kepada warga sekolah dan mengumumkan berapa jumlah dana BOS yang nantinya akan diterima sekolah.
- e. Kepala sekolah bersama guru, komite, dan tim manajemen BOS menyusun draft RKAS.
- f. Mengadakan rapat finalisasi RKAS yang diketahui oleh perwakilan orang tua siswa.
- g. Mengirimkan laporan final RKAS untuk disahkan oleh Unit Pengelola Pendidikan (UPP) setempat.

2. Pelaksanaan

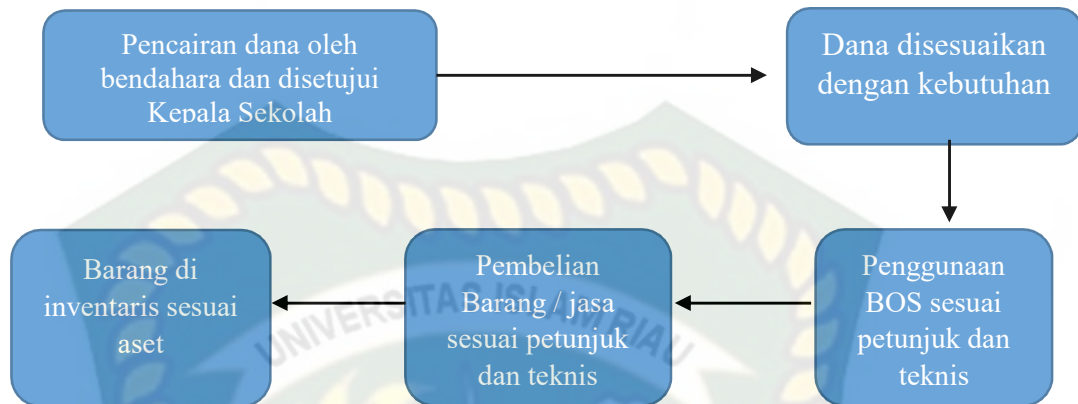
- a. Bendahara mengambil dana BOS yang telah disalurkan ke rekening masing-masing sekolah oleh pemerintah pusat.
- b. Dana BOS dicairkan sesuai kebutuhan sekolah dan tidak boleh diambil langsung seluruhnya.

- c. Penggunaan dana BOS mengacu pada 13 komponen yang terdapat dalam Juknis BOS yang berlaku dan didasarkan pada kesepakatan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite.
- d. Pembelian barang dan jasa dilaksanakan sesuai Juknis BOS dan dicatat dalam formulir inventaris barang.

3. Pelaporan

- a. Menyusun Buku Kas Umum (BOS-K3), Buku Pembantu Kas (BOSK4), Buku Pembantu Bank (BOS-K5), dan Buku Pembantu Pajak (BOS-K6).
- b. Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (BOS-K7) dan Rekapitulasi Penggunaan Tiap Sumber Dana (BOSK7a).
- c. Menyerahkan laporan BOS Triwulan ke UPP Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- d. Sekolah mengirimkam laporan penggunaan dana BOS secara online melalui website Kemendikbud (laporan BOS online).
- e. Sekolah mempunyai bukti pengeluaran dana (SPJ) yang sah dan akurat, dan juga mempunyai bukti setoran pajak.
- f. Sekolah melaporkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat melalui papan informasi dan surat edaran yang diberikan kepada orang tua siswa.

Alur Dana BOS :



Gambar I.1 Alur Penggunaan Dana BOS

Pengelolaan pendanaan yang baik dengan adanya dukungan manajemen pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha perbaikan pengelolaan Dana BOS dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima Dana Bantuan, Kas atau Dana adalah urusan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar di sekolah. Kas merupakan aktiva yang paling likuit, paling mudah dipindahkan dana relative mudah terjadi resiko penyelewengan. Kas juga merupakan suatu alat pembayaran yang sah dan mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga paling sering dijadikan sasaran penyelewengan pencurian terhadap kas tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan di biyai oleh dana BOS.

BOS diperuntukan setiap sekolah di Indonesia bertujuan untuk mengatasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun. Kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan dana BOS rawan terjadi penyelewengan dan ketidakefektifan manajemen dana BOS. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan seluruh siswa SD dan SMP dari biaya operasi sekolah,
2. Membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan apapun baik di sekolah negeri maupun swasta, dan
3. Meringankan biaya operasional sekolah terutama bagi sekolah swasta (Dirjen Pendidikan Dasar tentang Petunjuk Teknis BOS tahun 2015:3).

Agar dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat terpakai secara efektif dan efisien maka perlu adanya manajemen atau pengelolaan yang baik. Menurut Ismaya (2015:2) manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana dalam manajemen keuangan pada umumnya, kegiatan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, atau pengendalian.

Dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, sekolah wajib membebaskan biaya pendidikan siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orang tua menjadi ringan, BOS diarahkan agar bisa meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya BOS diharapkan mampu memfasilitasi rakyat yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Dengan adanya BOS fasilitas sekolah seharusnya juga menjadi perhatian, karena pendidikan tidak hanya membutuhkan teori

saja tetapi juga diperlukan praktek untuk menunjang keterampilan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Dilihat dari aspek fisik masih banyak gedung atau bangunan sekolah yang masih kurang layak pakai dan luput dari perhatian pemerintah. Apakah arti sekolah gratis kalau fasilitas sekolah sangat minimalis, tenaga pendidik kualitas rendah atau tidak profesional dan mutu pendidikan rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah manajemen dana yang ada dalam program BOS. Pentingnya manajemen dana BOS yaitu, dengan manajemen yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Manajemen dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dalam merencanakan penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Dengan adanya rencana, penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan baik.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin pada tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik negeri maupun swasta, menggratiskan seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah. Kebijakan sekolah gratis ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, selain kenaikan unit cost dana BOS yang diberikan kepada sekolah.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan. Beberapa persoalan muncul, misalnya terkait dengan jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah yang didasarkan pada unit cost tiap siswa dikalikan dengan jumlah murid. Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid besar, biaya operasional bisa tercukupi karena sekolah tersebut menerima dana dalam jumlah yang cukup besar. Namun, bagi sekolah yang jumlah muridnya kecil, dana yang diterimanya akan kecil dan tidak cukup mengingat ada sejumlah pos yang jumlahnya sama dan harus dikeluarkan tanpa membedakan apakah sekolah memiliki jumlah siswa besar atau kecil.

Sekarang ini, sekolah-sekolah di daerah kota maupun desa masih banyak yang belum memaksimalkan pemanfaatan dana BOS secara efektif dan efisien, dan tidak jarang sekolah yang sudah menerima dana BOS masih kekurangan sarana dan prasarana sekolah tersebut, seperti hal nya buku dan yang lebih sering terlihat adalah kurangnya perawatan bangunan sekolah. Fenomena diatas timbul dikarenakan pengelola kurang memahami bagaimana mengelola keuangan khususnya dana BOS.

Program Bantuan Operasional Sekolah di Komandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, Penyaluran Dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang di terbitkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai Kementerian Teknis yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan dan Pengeloan Program BOS.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dana di prioritaskan untuk kebutuhan operasional nonpersonalia, bukan untuk investasi dan bukan untuk kesejahteraan Guru.

Di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dalam penggunaan dana BOS ini tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi. Karena dana BOS ini hanya membiayai komponen-komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, perawatan sekolah, pembayaran honorium bulanan guru honorer dan lain sebagainya. Setelah menggunakan dan BOS kemudian langkah berikutnya yaitu membuat pertanggungjawaban. Dalam salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS masing-masing pengelola diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak yang terkait. Secara umum hal yang dilaporkan oleh

pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan, dan pemanfaatan dana serta pengaduan masalah jika ada.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS), masing-masing pengelola program BOS di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dana BOS. Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses Akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan Ekonomi, serta menggambarkan kinerja Keuangan Perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak serta merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi Keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kondisi Keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Undang-Undang, dan membuat suatu keputusan.

Laporan keuangan dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku kas umum, Buku pembantu kas, Buku pembantu bank, Buku pembantu pajak, pernyataan penggunaan dana BOS, Realisasi penggunaan dana BOS, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, surat permintaan pembayaran, Kuwitansi/bukti penerimaan, dan Kuwitansi/bukti pembayaran yang di keluarkan oleh sekolah. (Sumber : petunjuk teknis bantuan operasional sekolah).

Adanya kebijakan pemerintah dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan Pendidikan di Indonesia, dalam

penyaluran dan realitas dana BOS tersebut. Dalam pengelolaan keuangan dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan keuangan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Setelah dilakukan identifikasi mengenai kualitas pelayanan penyaluran dana BOS di Kabupaten Indragiri Hulu, maka Implementasi Penyaluran dana BOS oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020 secara Implementatif belum dilaksanakan sebagai mana yang diharapkan. Berdasarkan data penerimaan dana BOS SD/SMP tahun 2018 di Kecamatan Seberida adalah sebagai berikut: SD jumlah 95,373 siswa.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD, baik negeri maupun swasta diseluruh Provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya yaitu sebesar 940.000,- /Peserta didik pertahun. Adapun sekolah penerima dana BOS di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 452 sekolah dan sedangkan seluruh sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 460 sekolah maka dari itu peneliti cuma mengambil satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Seberida. Dapat kita lihat pada tabel 1.1 jumlah Dana BOS yang diterima setiap tahun pada tingkat SD.

Tabel 1.1. Jumlah Dana Bos SD di Kecamatan Seberida Tahun 2020

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Dana
1	SDN 001 Pangkalan Kasai	395	Rp. 371.300.000
2	SDN 002 Paya Rambai	148	Rp. 139.120.000
3	SDN 003 Beligan	194	Rp. 182.360.000
4	SDN 004 Belilas	254	Rp. 238.760.000
5	SDN 005 Titian Resak	270	Rp. 253.800.000
6	SDN 006 Buluh Rampai	159	Rp. 149.460.000
7	SDN 007 Lubuk Bangko	108	Rp. 101.520.000
8	SDN 008 Buluh Rampai	92	Rp. 86.480.000
9	SDN 009 Petala Bumi	181	Rp. 170.140.000
10	SDN 010 Seresam	140	Rp. 131.600.000
11	SDN 011 Titian Resak	127	Rp. 119.380.000
12	SDN 012 Buluh Rampai	62	Rp. 58.280.000
13	SDN 013 Bukit Meranti	87	Rp. 81.780.000
14	SDN 014 Sebatat	247	Rp. 232.180.000
15	SDN 015 Petala Bumi	185	Rp. 173.900.000
16	SDN 016 Kelesa	161	Rp. 151.340.000
17	SDN 017 Titian Resak	114	Rp. 107.160.000
18	SDN 018 Sei Arang	116	Rp. 109.040.000
19	SDN 019 Bukit Meranti	129	Rp. 121.260.000
20	SDN 020 Simpang IV Belilas	69	Rp. 648.600.000
21	SDN 021 Berapit	99	Rp. 93.060.000
22	SDN 022 Sungai Bangkar	182	Rp. 171.080.000
23	SDN 023 Beligan	162	Rp. 152.280.000
24	SDN 024 Sebatat	104	Rp. 977.600.000
	Jumlah	3785	Rp. 3.557.900.000

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah dana BOS yang diterima setiap sekolah pertahunnya berbeda-beda diterima jumlah dana BOS tidak selalu sama, dari 24 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Seberida Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu menyalurkan dana sebesar Rp. 3.557.900'- pada tahun 2020, dari sini bisa dilihat bahwa dana yang disalurkan bervariasi berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020 proses penyaluran Dana dilakukan setiap periode 3 bulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember.

Dengan penyaluran dana bantuan operasional sekolah, sekolah wajib membebaskan biaya pendidikan siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orang tua menjadi ringan, BOS diarahkan agar bisa meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya BOS diharapkan mampu memfasilitasi rakyat yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Dengan adanya BOS fasilitas sekolah seharusnya juga menjadi perhatian, karena pendidikan tidak hanya membutuhkan teori saja tetapi juga diperlukan praktek untuk menunjang ketrampilan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik.

Dilihat dari aspek fisik masih banyak gedung atau bangunan sekolah yang masih kurang layak pakai dan luput dari perhatian pemerintah. Apalah arti sekolah gratis kalau fasilitas sekolah sangat minimalis, tenaga pendidik kualitasnya rendah atau tidak profesional dan mutu pendidikannya rendah. Akan tetapi tidak hanya dari aspek fisik saja yang perlu diperhatikan tetapi dari aspek mental juga perlu diperhatikan. Kita sering lupa bahwa pembangunan mental juga diperlukan agar pendidikan tidak hanya berjalan di tempat saja, agar dapat mengentaskan masyarakat dari kebodohan selama ini. Kita jangan hanya mengedepankan aspek fisik saja tetapi dari segi mental juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Di Kecamatan Seberida, terdapat 24 SD Negeri, dilihat dari mutu pendidikan dan kualitas sekolah-sekolah di Kecamatan Seberida masih kurang memadai dari apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini membahas tentang bantuan operasional sekolah di SD Negeri Kecamatan Seberida dan lebih di fokuskan pada SDN 004 Belilas. Di Kecamatan Seberida pada umumnya kualitas pendidikan masih rendah dan fasilitas sekolah masih kurang mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya dana BOS diharapkan mutu pendidikan semakin meningkat.

Melihat realita tersebut, pemerintah mencoba meminimalisir berbagai bentuk kesenjangan yang mungkin terjadi dengan berusaha merealisasikan pengalokasian dana APBN sebesar 20% untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk dialihkan pengalokasiannya dalam bentuk kompensasi pun dilaksanakan. Salah satunya alokasi pada sektor pendidikan dengan pengadaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyaluran dana BOS tersebut dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi yang disalurkan melalui rekening sekolah, dan penyaluran dana BOS tersebut melalui data penerima dana BOS yang dikirim dari sekolah ke Tim Manajemen Kabupaten untuk dikirim ke Tim Manajemen Provinsi sesuai data yang akurat.

Program BOS diamanatkan pemerintah guna mewujudkan pendidikan murah bahkan gratis. Namun dalam implementasinya pemerintah masih terlihat kurang serius, hal ini tergambar dari petunjuk pelaksanaan yang diedarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terkesan membuka peluang atau kesempatan bagi sekolah untuk tetap melakukan pemungutan terhadap orang tua siswa. SDN 004 Belilas

merupakan salah satu sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah ini memiliki 1 Ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 11 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 Ruang TU, 1 Musholah, 3 Kamar mandi/wc Murid, 2 kamar mandi/wc guru.

Jumlah siswa yang ada di SDN 004 Belilas sampai tahun 2021 adalah 254 siswa, sedangkan jumlah Guru yang ada disekolah tersebut berjumlah 13 orang termasuk guru PAI dan BMR, serta 2 diantaranya berstatus Non PNS. SDN 004 Belilas merupakan sekolah Negeri yang mayoritas para siswa nya mempunyai latar belakang keluarga yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah pertama, Prestasi siswa di SDN 004 Belilas ini masih rendah karena kurangnya motivasi belajar siswa, Dalam bidang Ekstrakurikuler di SDN 004 Belilas ini belum berjalan dengan baik karena kurang memadainya sarana yang ada dan kurangnya pembinaan terhadap minat dan bakat siswa.

Bersadarkan gambaran umum diatas maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian di SDN 004 Belilas yaitu:

1. Belum efektifnya penggunaan dana BOS di SDN 004 Belilas, hal ini terlihat dari prakteknya pelaksanaan BOS belum optimal seperti masyarakat masih dibebani dengan adanya biaya pendaftaran siswa baru, sumbangan uang gedung dan sebagainya.
2. Sarana dan prasara dalam menunjang proses pembelajaran siswa belum memadai, seperti ketersediaan sarana olahraga, sarana dan prasarana

pembelajaran, sarana dan prasarana penunjang ekstrakurikuler serta ketersediaan buku dipustakaaan yang belum memadai.

3. Kemampuan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk sebagai pengelola dana bos masih rendah, hal ini dikarenakan Tenaga Pendidikan yang mengelola dana BOS harus berstatus PNS, sedangkan Tenaga Kependidikan tersebut belum maksimal menguasai akuntansi dalam pelaporan keuangan dan juga dalam penggunaan teknologi masih rendah, sementara dalam pencairan, penggunaan dan pelaporan dana BOS sudah menggunakan aplikasi (online). Sehingga Tenaga Kependidikan tersebut masih membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Belum adanya penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan anggaran dana BOS. Hal ini diketahui bahwa dalam penggunaan dana BOS yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa namun dalam penggunaannya tidak sampaikan kepada siswa atau wali murid dan murni hanya dikelola oleh pihak sekolah tanpa sepengetahuan wali murid.
5. Penggunaan dana bos sering kali belum sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam penggunaan dana bos belum efektif dan tepat sasaran.
6. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai anggaran dana BOS dan pembebasan biaya bagi anak usia pendidikan dasar 9 tahun sehingga masih ditemukan anak yang tidak bersekolah dikarenakan belum adanya biaya di lingkungan SDN 004 Belilas.

7. Rendahnya pengawasan dari Kepala Sekolah dan juga pengawas sekolah mengenai Implementasi dana BOS di SDN 004 Belilas.

Demikian banyaknya permasalahan mengenai implementasi dana BOS yang telah penulis paparkan diatas, maka timbul suatu keinginan penulis untuk meneliti lebih dalam dengan judul penelitian : **“Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena – fenomena di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah faktor penghambat Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Manajemen Kebijakan.

2. Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dapat bermanfaat bagi lembaga – lembaga kajian lainnya yang juga mengkaji topik yang sama.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat sebagai masukan bagi sekolah – sekolah dalam pengelolaan dana BOS agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam penggunaannya, serta kepada kepala sekolah agar lebih mengawasi dalam penggunaan dana BOS disekolahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administear* yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakkan (*to direct*). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat.

Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya *Teori Administrasi Publik* (2011:3) mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya.

Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya *Teori Administrasi Publik* (2011: 3) mengemukakan bahwa : Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap

pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya.

Pengertian Administrasi Negara menurut Waldo dalam Kencana dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (2003:33) mengemukakan, bahwa : Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas administrasi Negara merupakan gabungan dari manajemen dan organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pemerintah. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2008:7) mengatakan pengertian Administrasi Negara sebagai berikut: Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakkan suatu organisasi pemerintah.

Sedangkan menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) mengemukakan bahwa: “Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik.

Sementara itu, Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa: “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan “Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.” Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

2.1.2. Konsep Organisasi

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan, membentuk kelompok dengan manusia yang lain. Salah satu alasan mengapa manusia selalu berkelompok adalah karena kebutuhan manusia yang

semakin kompleks dari waktu ke waktu sehingga manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi seperti ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang bersifat organis, yang artinya bagian yang satu dengan yang lain saling memenuhi atau melengkapi. Agar kondisi yang diinginkan terus berjalan sesuai harapan, maka diperlukan pengorganisasian agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sifat mengatur terhadap segala tindakannya (Suharsono, 2012:11).

Selama ini banyak praktek organisasi yang dalam upaya pencapaian tujuannya lebih banyak didominasi oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu saja. Padahal organisasi merupakan masalah yang kompleks dan multidisipliner. Oleh karena itu, organisasi dapat dipahami dari berbagai perspektif. Pengertian organisasi pun berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing disiplin ilmu (ekonomi, bisnis, sosial, politik, dan lain-lain). Bagi seorang ekonom, organisasi difokuskan pada bagaimana menyediakan barang dan jasa yang cukup bagi masyarakat. Bagi praktisi bisnis yang sering berhadapan dengan situasi penuh persaingan, maka organisasi ditempatkan sebagai wadah untuk mencapai tingkat keuntungan yang memadai.

Ada beberapa pengertian tentang organisasi, menurut beberapa ahli (Suharsono, 2012:13): Menurut Ernest Dale organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola-pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok kerja.

Menurut Cyril Soffer (dalam Suharsono, 2012:13), organisasi merupakan perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sosial kerja dan pembagian kerja yang diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan diantara pemegang peranan dan kemudian digabung dalam beberapa bentuk hasil.

Menurut Kast dan Rosenzweig (dalam Suharsono, 2012:13), organisasi (perusahaan) adalah adanya orang-orang yang usahanya harus dikordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling tergantung, bekerja bersama atas dasar pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Menurut Gibson (dalam Suharsono, 2012:13), organisasi artinya mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan menurut Edgar Schein, organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Masih banyak lagi definisi mengenai organisasi menurut para ahli, namun tetap memiliki satu inti yaitu pencapaian tujuan yang sesuai dengan harapan. Manusia diwajibkan mengenal organisasi karena organisasi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sebagai contoh misalnya seorang pelaku bisnis ternyata juga harus berhubungan dengan berbagai organisasi atau instansi tertentu. Maka dari itu seseorang perlu mempelajari organisasi agar dapat secara mandiri mendesain struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Siagian (2008:6), mengemukakan : “Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.” Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi menurut Manullang (2009:59) mengemukakan : “Perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.” Organisasi menurut Hasibuan (2007:5) mengemukakan, bahwa: “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.” Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus.

Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur. Bentuk Organisasi menurut Manullang (2009:61), yaitu :

1. Bentuk Organisasi Garis Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.
2. Bentuk Organisasi Fungsional Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.
3. Bentuk Organisasi Garis dan Staf Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.
4. Bentuk Organisasi Staf dan Fungsional Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktivitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang

melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu, maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/bagian.

2.1.3. Konsep Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, maneggio, yang diadopsi dari Bahasa Latin managiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 1999: 8). Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan

menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. (Choliq, 2011: 2) Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Choliq, 2011:3) Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Manajemen menjadi hal yang esensial dibutuhkan dalam setiap kerjasama karena manajemen mampu mengoptimasi dan mengintegrasikan setiap usaha-usaha individual menjadi usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kerjasama organisasional mencapai tujuan secara kuat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen dari organisasi. Manajemen pada intinya upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan atau menggunakan sumber daya dalam organisasi.

Manajemen menurut Hasibuan (2007:1) mengemukakan, bahwa : “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Manajemen dengan penggunaan sumber-sumber menjadi efisien (*low waste*) dan pencapaian tujuan menjadi efektif (*high attainment*). Karena

masyarakat tidak lepas dari kerjasama dan kerjasama membutuhkan manajemen, maka kegiatan masyarakat yang selalu ada pada tiap waktu dalam banyak kegiatan pencapaian tujuan adalah kegiatan manajemen.

Manajemen menurut Siagian (2008:5) mengemukakan, bahwa : “Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.”

Manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Jelas hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak boleh menentukan tujuan, akan tetapi tujuan yang ditentukan pada tingkat manajemen hanya boleh bersifat departemental atau sektoral.

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai” (Choliq, 2011: 36). Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah Planning, Organizing, Motivating dan Controlling. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik (Hasibuan, 2005: 3-4). Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen dakwah sebagai berikut:

1. Perencanaan Menurut G.R. Terry, Planning atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Purwanto, 2006: 45). Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan

tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa (Handoko, 1999: 79).

2. Pengorganisasian Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.

Pengorganisasian (organizing) adalah

- a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,
- b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.,
- c. Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan (Handoko, 2009: 24). G.R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: “Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Hasibuan, 2001: 23).”

3. Penggerakkan Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatankegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagibagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan- kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai (Shaleh, 1977: 101). Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usahausaha pengorganisasian (Purwanto, 2006: 58).
4. Pengawasan Fungsi keempat dari seorang pemimpin adalah pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan (Manullang, 2002: 171).

Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar (Purwanto, 2006: 67). Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaktidaknya

harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana (Manullang, 2002: 174).

2.1.4. Konsep Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Carl Friedrich (Wahab, 2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Rian Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Meter dan Horn dalam Subarsono (2005 : 99) mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan.

Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan: yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya: kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan

memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

3. Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana: implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.
6. Disposisi sikap para pelaksana: persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian

kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada didalamnya termasuk konteks politik.

Pendapat Anderson (Wahab, 2008:3), merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah.

Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu

kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih

khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokrtisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan *adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.5. Konsep Implementasi Kebijakan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh- sungguh untuk mencapai tujuan.

Leo Agustino dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya Implementation and Publik Policy (1983:61) mendefenisikan kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101- 102)

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah

ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

1. Alasan Ilmiah Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2. Alasan professional Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. c) Alasan Politik Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yaitu (AG Subarsono, 2005 : 90-92):

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut (Sugiyono, 2005 : 49). Oleh sebab itu, komunikasi harus mempunyai unsur :

- a. Ketetapan komunikasi dengan pelaksana.
- b. Konstan/keseragaman.
- c. Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas.
- d. Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat.
- e. Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka kerjakan.

- f. Komunikasi membutuhkan keakuratan.
- g. Implementasi ini tidak hanya diterima, namun mereka harus juga jalan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
- h. Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.
- i. Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total atau distorsi komunikasi.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap

atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating), inimenjadi pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidak aktifan birokrasi. Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (AG Subarsono, 2005 : 8).

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu: “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya

akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Edward III di atas, maka Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik”

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: Kesatu yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:142), sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang

tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono (2008:7) kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Pendapat lain, menurut Edwards III (Subarsono, 2008:91) watak, karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementator memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 2004:77) bahwa: “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”.

Menurut Edward III (Widodo, 2007:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:101) bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.

Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008:144) adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

2.1.6. Program Bantuan Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik

pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam menunjang mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut adalah dengan memberikan bantuan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan pemerintah untuk mendukung program pendidikan yang berkualitas.

Program BOS oleh pemerintah ditujukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula.

2.1.7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan

layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dana BOS adalah program pemerintahan yang berasal dari realokasi dana SUBSIDI BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain. Dengan BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik negeri maupun Swasta diseluruh provinsi Indonesia.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan di biyai oleh dana BOS.

Lain halnya dengan Permendiknas nomor 69 tahun 2009 BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
2. Membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah;
3. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
4. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Kriteria bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Semua sekolah SD/SMP yang sudah memiliki nomor nasional (NPSN) dan terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) wajib menerima dana BOS.
2. Semua sekolah SD/SMP dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik.
3. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
4. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang

diperlukan sekolah dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

5. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan di nilai meresahkan masyarakat.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) berhak menerima dana BOS. Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya yaitu SD sebesar 800.000,- /Peserta didik/tahun, SMP sebesar 1.000.000,-/siswa/tahun, SMA dan SMK sebesar 1.400.000,-/siswa/tahun.

Berdasarkan Pedoman BOS 2009, Dana BOS digunakan untuk:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikelola di perpustakaan.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.

5. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, spidol, pensil, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
7. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel dan perawatan lainnya.
8. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan dan hoberer sekolah yang tidak dibiayai Pemerinth atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
10. Membantu siswa miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
12. Pembelian dan perangkat computer
13. Bila seluruh komponen diatas telah dipenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebel sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban yang mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus

mengikuti batas kewajaran. Selain itu dana BOS tidak dapat digunakan untuk kegiatan atau usaha yang berkenaan dengan:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
4. Membangun gedung/ruangan baru.
5. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
6. Menanamkan saham.
7. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebesar 60 peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.

Sekolah yang menerima kebijakan khusus minimal 60 (enam puluh) peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. Satap, SLB, SDLB dan SMPLB
3. Sekolah didaerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya
4. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah dengan kriteria yaitu :

1. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal
2. Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun
3. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain disekitarnya yang masih dapat menampung peserta didik
4. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut
5. Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap Triwulan (tiga bulan) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Triwulan I sebesar 20% (Januari-Maret) dilakukan paling lambat minggu ketiga di bulan Januari.
2. Triwulan II sebesar 40% (April-Juni) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan April.
3. Triwulan III 20% (Juli-Agustus) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli.
4. Triwulan IV 20% (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Oktober.

Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terperinci) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (semesteran) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester I sebesar 60% (Januari- Juni) dilakukan paling lambat minggu ketiga di Januari
2. Semester II 60% (Juli- Desember) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli.

Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyerahkan/ menyalurkan dana BOS kesekolah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah dana diterima di RKUD. Pengalokasian/ pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi

2. Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, tim manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi
3. Tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melalui verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah
4. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang tersedia menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dewan pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampirkan daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang tersedia menerima BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan
5. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirim SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen BOS provinsi, tembusan ke bank/pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala yang diteliti berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori – teori yang telah ada mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas

Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis hasil penelitian.

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
1	Septia Ningsih (2017) Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015	Implementasi Kebijakan	Hasil penelitian ini adalah Program Dana BOS yang dilaksanakan dalam rangka wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar memprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat kurang mampu yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.	Persamaan penelitian terdapat pada variable penelitian sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian.
2	Ines Delaney Natasha, Aufarul Marom, Dewi Rostyaningsih (2018)	Implementasi Kebijakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa	Persamaan penelitian terdapat pada variable penelitian sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta metode penelitian dan alat analisis yang

1	2	3	5	6
	Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Semarang.		<p>implementasi program BOS di SMP Negeri 2 Semarang sudah cukup baik, walaupun masih ada kendala dalam implementasinya. Hal tersebut dapat dilihat dari: a. Penggunaan dana BOS belum bisa dilakukan secara maksimal seperti ada beberapa komponen pembiayaan yang seharusnya bisa ditutupi dengan dana BOS namun tidak bisa dilakukan karena adanya batasan penggunaan dana. Pengelolaan dana BOS sudah cukup baik dilihat dari laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang sudah dilakukan secara berkala dan rutin setiap triwulan serta transparansi penggunaan dana BOS sudah dilakukan dengan</p>	digunakan dalam penelitian.

1	2	3	5	6
			memasang papan pengumuman di area sekolah.	
3	Arief Januwarso (2020) Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro	Implementasi	Pelaksanaan tahap persiapan program BOS sudah dilakukan dengan baik, telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dengan sangat baik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BOS telah dilakukan dengan baik, hasil monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten dan masih ditemukan ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan program BOS yang sudah ada sosialisasi dan rekomendasi pada Tim Manajemen BOS sekolah untuk melakukan pembenahan pembukuan dan pembelajaran agar sesuai juknis.	Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu dana BOS, sedangkan perbedaan terletak pada variable yang digunakan, indikator penelitian dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.
4	Roni Suwendra (2014)	Pengelolaan	Pengelolaan Dana BOS di SDN 01 Tanjung Jati VII	Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu dana bos,

1	2	3	5	6
	<p>Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati VII Koto Tagalo Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota</p>		<p>Talago dikategorikan cukup baik, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam mengelola dana BOS dan keterlambatan pencairan dana BOS dari pusat.</p>	<p>sedangkan perbedaan terletak pada variable yang digunakan, indikator penelitian dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.</p>
5	<p>Helnikusdita (2016) Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</p> <p>(Journal Manajemen Pendidikan, Volume 10 Nomor 2016 hlm 527-539)</p>	Implementasi	<p>Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana operasional sekolah di SMA N 4 Selama mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, pedoman teknis dan operasional yang sesuai BOS SMA</p>	<p>Persamaan penelitian terdapat pada variable penelitian sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian.</p>
6	<p>Rahmad Hidayat dan Agus Suryono (2014) Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bos dan Laporan Keuangan Bos</p> <p>(Jurnal Reformasi, Vol 4 No. 1 Juni 2014)</p>	Implementasi Kebijakan	<p>Hasil penelitian menunjukan, proses implementasi kebijakan penggunaan dana dan laporan keuangan BOS di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo telah dilaksanakan namun belum optimal. Terdapat perbedaan dalam implementasi penggunaan dana</p>	<p>Persamaan penelitian terdapat pada variable penelitian sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian.</p>

1	2	3	5	6
			<p>BOS pada kedua sekolah ini. Sedangkan untuk mekanisme pelaporan keuangannya, kedua sekolah yaitu SMPN 3 Woja dan SMPN 3 Palibelo ini sudah mengikuti petunjuk teknis yang ada seperti adanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), pembukuan, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, bukti pengeluaran, pelaporan, dan waktu pelaporan yang sudah tersedia di masing-masing sekolah walaupun belum optimal.</p>	
7	<p>Lika (2016) Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>(e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2016 Vol4No 3)</p>	Implementasi Program	<p>Hasil penelitian diperoleh penulis bahwa Implementasi Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak kabupaten Kutai Barat adalah bahwa pihak sekolah sudah melaksanakan program Bantuan</p>	<p>Persamaan penelitian terdapat pada variable penelitian sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian.</p>

1	2	3	5	6
			<p>Operasional dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada di JUKNIS dan BOS di sekolahnya hanya saja ditemukan beberapa hambatan-hambatan yang membuat program tersebut belum maksimal berjalan</p>	
8	<p>Putu Sucika dan I Nyoman Suprpta (2018) Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng</p> <p>(Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 Februari 2018)</p>	Implementasi	<p>Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan dalam implementasi dana BOS SD Negeri 1 Penarukan, secara umum gambarkan bahwa implementasi alokasi dana BOS berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implemetasi. Implementasi dana BOS sangat mempengaruhi pemerataan pendidikan di SD Negeri 1 Penarukan karena bisa sebagai</p>	<p>Persamaan penelitian terdapat pada variable penelitian sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian.</p>

1	2	3	5	6
			<p>seluruh pembiayaan kegiatan non-personalia seperti pembiayaan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku refrensi perpustakaan, pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler, ulangan dan ujian.</p>	
9	<p>Abdul Wahid (2014) Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Kota Palu</p> <p>(ejournal Katalogis, Vol 2 No. 7 Juli 2014)</p>	Implementasi Kebijakan	<p>Komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam implementasi kebijakan, faktor komunikasi menjadi jalur utama untuk pelaksanaan setiap program. Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap institusi atau unit tertentu baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, Demikian pula sebaliknya jika perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka</p>	<p>Persamaan penelitian terdapat pada variable penelitian sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian.</p>

1	2	3	5	6
			proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit	
10	Andre Prasetyo Widodo, Agresi Indah Purnamasari, Yossi Indra Wardani, Della Aulia Hidayah, Zulfiah Nur Hasannah (2020) Implementasi Kebijakan Dana Bos di Kota Malang (Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial Vol 17 No. 2 Tahun 2020)	Implementasi kebijakan	Berdasarkan hasil penelitian diketahui Implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang ada beberapa masalah, salah satunya masih banyak pihak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat atau wali siswa sehingga problematika ini mengakibatkan kecurigaan akan masalah dana BOS tersebut.	Persamaan penelitian terdapat pada variable penelitian sedangkan perbedaan terletak pada indikator yang digunakan serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian terdahulu adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, yang memiliki relevansi dan keterkaitan topik. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi orisinalitas dari masing – masing penelitian. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dan penelitian terdahulu terdapat pada variable penelitian yaitu implementasi kebijakan, objek penelitian yaitu Dana BOS dan metode penelitian dengan menggunakan teknik kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada

indikator penelitian. Dan perbedaan terdapat pula pada locus dan waktu penelitian sehingga penelitian ini sangat perlu dilakukan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada prinsipnya penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya namun melakukan pengembangan sekaligus melanjutkan penelitian sebelumnya melalui implementasi kebijakan mengenai program bantuan operasional sekolah. Untuk lebih memahami, berikut diklasifikasikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dengan menggunakan tabel.

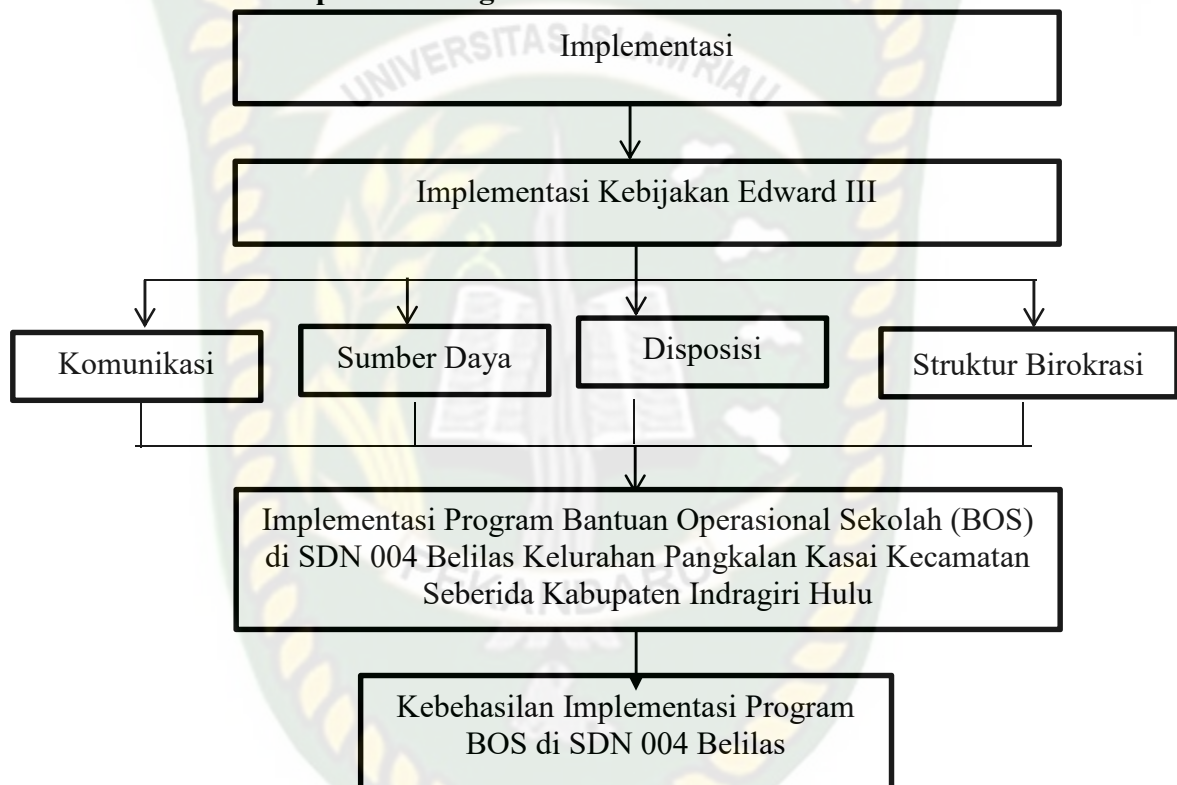
2.3. Kerangka Pemikiran

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tuntas dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh Bos, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

Program BOS oleh pemerintah ditujukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik

akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula.

Gambar 2.1. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

2.4. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahpahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini memberi batasan berupa konsep operasional yaitu sebagai berikut :

1. Administrasi adalah suatu usaha untuk melayani, usaha untuk membantu, usaha untuk menolong, usaha untuk memenuhi, usaha untuk mengarahkan dan atau usaha untuk memimpin semua kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan – hubungan formal dalam rangkaian terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.
3. Manajemen adalah suatu proses serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan melalui kerjasama dan pemanfaatan semaksimal mungkin sumberdaya yang ada.
4. Kebijakan adalah sebuah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.
5. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
6. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

7. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
8. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
9. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang bertujuan untuk membebaskan biaya operasional pendidikan.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Sosialisasi dana bos b. Clarity (Kejelasan) penggunaan dana bos c. Consistency (Konsisten)
		2. Resources (Sumber Daya)	a. Sumber daya manusia b. Dana / anggaran c. Sarana dan prasarana
		3. Disposisi	a. Dampak disposisi b. Sikap pelaksana
		4. Struktur Birokrasi	a. Struktur Organisasi b. SOP pelaksanaan bos

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017:8), Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis melihat dalam mengimplementasikan dana Bos di SDN 004 Belilas masih banyak yang belum memahami tentang bagaimana cara penggunaan dana Bos sehingga dalam implementasinya seringkali tidak tepat sasaran.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Kepala Sekolah SDN 004 Belilas. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan – informan berikutnya, dengan catatan informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.

Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari 1 orang Bendahara BOS dan 2 orang Guru di SDN 004 Belilas serta 3 orang wali murid di SDN 004 Belilas. Dari keseluruhan jumlah Key Informan dan informan pendukung berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 :Jumlah Informan Pada Penelitian Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Informan Penelitian	Jumlah	Nama
1	Kepala Sekolah SDN 004 Belilas	1	Asmawati, S.Hum.
2	Bendahara BOS SDN 004 Belilas	1	Helfinayeti, S.Pd
3	Guru di SDN 004 Belilas	2	1. Zaenudin, S.Pd 2. Abd Muis Repelita, S.Pd.
4	Wali Murid SDN 004 Belilas	3	1. Rahmat Syukron 2. Noprizal 3. Suryadi
	Jumlah	7	

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

3.4. Teknik Penetapan Informan

Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2008:218) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumberdata dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya

pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer.

Sumber / data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dan juga hasil dari kuisioner. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dilapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lokasi penelitian.

2. Data sekunder.

Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012: 225). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur – literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moeleong (2012: 121) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata – kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui

catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan adalah kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat yang terkait dengan Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1. Wawancara (Interview)

Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak – pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2012: 316). Adapun informan yang akan di wawancara dalam penelitian ini Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru dan Wali Murid di SDN 004 Belilas.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012: 145) yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari pendapat tersebut peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan

mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala – gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146). Hasil dari dokumentasi berupa dokumen – dokumen baik dokumen tertulis maupun dalam bentuk gambar terkait dengan penelitian yang berjudul Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh yang bertujuan menghasilkan data yang akurat dari obyek yang diteliti kemudian di paparkan sesuai dengan kondisi dan waktu. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Nazir (2011:346) menyebutkan Analisis Data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

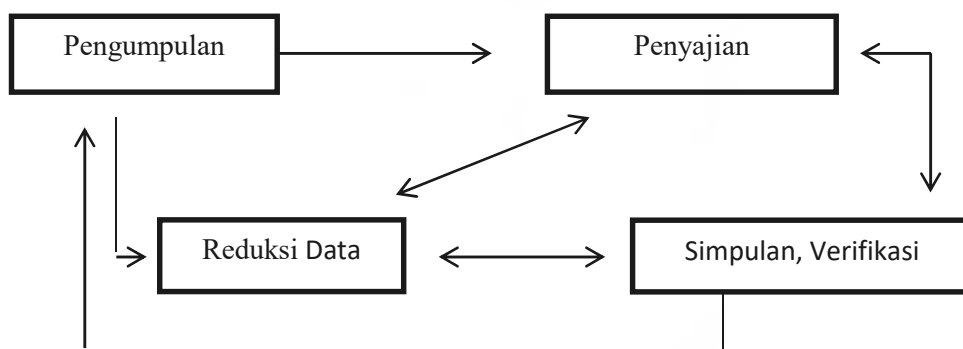
Menurut Milles and Huberman (2007:174), analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek (Milles and Huberman (2007:175).

Analisis terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan selama kegiatan penelitian dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (2014:20) dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 3.1

Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Adapun teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diperoleh dari lapangan dan ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci. Menurut Moleong (2012:247) reduksi data dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Dalam penelitian ini, penulis melihat data-data dari lokasi penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah pengumpulan data, Penulis mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu kedalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan, dari data yang terkumpul kemudian

dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya dan di bandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan menumpuk, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh melalui pendekatan teknik pengumpulan data selanjutnya dianalisis sehingga mempunyai makna dan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017:8), Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis melihat dalam mengimplementasikan dana Bos di SDN 004 Belilas masih banyak yang belum memahami tentang bagaimana cara penggunaan dana Bos sehingga dalam implementasinya seringkali tidak tepat sasaran.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Kepala Sekolah SDN 004 Belilas. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan – informan berikutnya, dengan catatan informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.

Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari 1 orang Bendahara BOS dan 2 orang Guru di SDN 004 Belilas serta 3 orang wali murid di SDN 004 Belilas. Dari keseluruhan jumlah Key Informan dan informan pendukung berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 :Jumlah Informan Pada Penelitian Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Informan Penelitian	Jumlah	Nama
1	Kepala Sekolah SDN 004 Belilas	1	Asmawati, S.Hum.
2	Bendahara BOS SDN 004 Belilas	1	Helfinayeti, S.Pd
3	Guru di SDN 004 Belilas	2	1. Zaenudin, S.Pd 2. Abd Muis Repelita, S.Pd.
4	Wali Murid SDN 004 Belilas	3	1. Rahmat Syukron 2. Noprizal 3. Suryadi
	Jumlah	7	

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

3.4. Teknik Penetapan Informan

Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2008:218) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumberdata dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya

pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer.

Sumber / data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dan juga hasil dari kuisioner. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dilapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lokasi penelitian.

2. Data sekunder.

Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012: 225). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur – literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moeleong (2012: 121) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata – kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui

catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan adalah kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat yang terkait dengan Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1. Wawancara (Interview)

Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak – pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2012: 316). Adapun informan yang akan di wawancara dalam penelitian ini Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru dan Wali Murid di SDN 004 Belilas.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012: 145) yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari pendapat tersebut peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan

mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala – gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146). Hasil dari dokumentasi berupa dokumen – dokumen baik dokumen tertulis maupun dalam bentuk gambar terkait dengan penelitian yang berjudul Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh yang bertujuan menghasilkan data yang akurat dari obyek yang diteliti kemudian di paparkan sesuai dengan kondisi dan waktu. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Nazir (2011:346) menyebutkan Analisis Data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

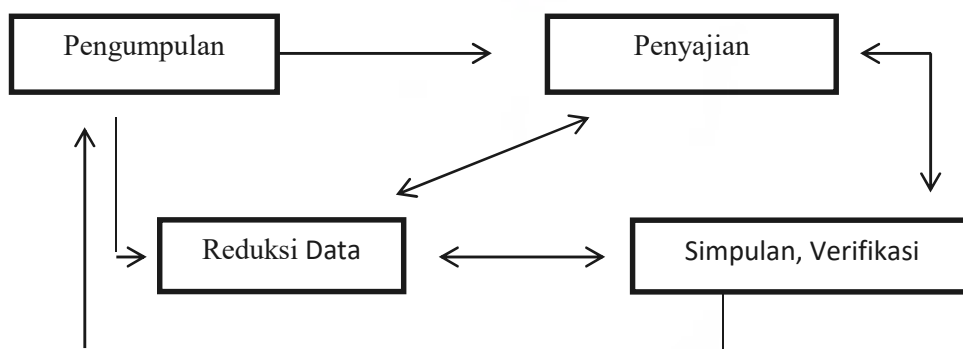
Menurut Milles and Huberman (2007:174), analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek (Milles and Huberman (2007:175).

Analisis terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan selama kegiatan penelitian dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (2014:20) dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 3.1

Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Adapun teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diperoleh dari lapangan dan ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci. Menurut Moleong (2012:247) reduksi data dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Dalam penelitian ini, penulis melihat data-data dari lokasi penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah pengumpulan data, Penulis mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu kedalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan, dari data yang terkumpul kemudian

dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya dan di bandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan menumpuk, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh melalui pendekatan teknik pengumpulan data selanjutnya dianalisis sehingga mempunyai makna dan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing- masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau denan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
 - a. Kec. Rengat Ibukota Rengat
 - b. Kec Pasir Penyau ibukota Air Molek
 - c. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
 - d. Kec. Peranap ibukota Peranap
 - e. Kec. Kuantan Hilir ibukora Baserah
 - f. Kec kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.
 - g. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi
 - h. Kec. Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyau, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah:

- a. Kec. Benai ibukota Benai
- b. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
- c. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yan berkedudukan di Taluk Kuantan dan

Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :

- a. Kec. Rengat ibukota Rengat
- b. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
- c. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
- d. Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberida
- e. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
- f. Kec. Pasir Peny, ibukota Air Molek
- g. Kec. Lirik, ibukota Lirik
- h. Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang
- i. Kecamatan Peranap ibukota Peranap
- j. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
- k. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
- l. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
- m. Kec. Lubuk Batu Jays, ibukota Lubuk Batu Tinggal
- n. Kec. Kuala cenaku, ibukota kuala cenaku.

2. Wilayah Geografis

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan di sebelah Hilir. Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No. 6 Tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu

dimekarkan lagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Setelah pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 2 kabupaten. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2008 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, waktu pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 1999 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tinggal 6 kecamatan. Setelah dimekarkan 3 kecamatan, maka kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu sekarang menjadi 9 kecamatan berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2000.

3. Demografis

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa decade terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU- 102° LS dan 102° BT - 102° 48' BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km² (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C - 31.70 C.

Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu: Barat : Kabupaten Kuantan Singingi Timor : Kabupaten Indragiri Hilir Utara : Kabupaten Pelalawan Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi. Ibu Kota Kabupaten ini adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 16 kelurahan.

4. Topografi

Topografi merupakan tanda fisik dari daratan. Bentuk-bentuk topografi meliputi bukit, lembah, dataran pantai, jurang, dan sebagainya juga dimasukkan dalam bentuk topografi seperti gunung, aliran larva, garis patahan. Fisiografi wilayah atau bentuk lahan (landform) Kabupaten Indragiri Hulu terdiri atas:

1. Dataran aluvial, yang terdapat di tepi sungai-sungai tersebut dengan kemiringan 0 – 3 %, semakin ke hilir semakin dipengaruhi oleh pasang-surut dan berbentuk rawa lebak.
2. Dataran gambut, menonjol di Kecamatan Rengat dan Kuala Cenaku, dengan kedalaman gambut yang bervariasi.
3. Dataran peralihan, yaitu peralihan antara dataran aluvial dan dataran gambut dengan wilayah perbukitan; dataran peralihan relatif menonjol dan dominan di Indragiri Hulu, dengan bentuk lahan bervariasi dari datar hingga bergelombang (undulating).
4. Perbukitan, dimana ketinggian lebih tinggi dari dataran peralihan, yang terdiri atas kompleks perbukitan, dan berada di perbatasan dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (dengan ketinggian sampai sekitar 800 m dpl), Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Pelalawan bagian hulu. Dataran aluvial dan dataran gambut relatif terletak pada ketinggian lebih kecil dari 25 meter dpl. dengan kemiringan dominan adalah 0 – 3 %, dataran peralihan relatif terletak pada ketinggian antara 25 meter – 100 meter dpl. dengan kemiringan dominan adalah 3 – 8 % dan 8 – 15 %, dan perbukitan relatif terletak pada ketinggian 100 meter

– 500 meter dpl. dan ketinggian 500 m – 800 meter dpl. dengan kemiringan dominan 15 – 40 % dan lebih besar 40 %.

5. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu meningkat rata-rata sebesar 1,9% per tahun. Jumlah penduduk kabupaten ini meningkat dari 417,733 jiwa pada tahun 2016 menjadi 425,897 jiwa pada tahun 2017. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk lakilaki meningkat dari 214.402 jiwa pada tahun 2016 menjadi 218.496 pada tahun 2017. Jumlah penduduk perempuan meningkat dari 203.331 pada tahun 2016 menjadi 207.401 pada tahun 2017. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah rumahtangga di Kabupaten Indragiri Hulu juga cenderung meningkat. Jumlah penduduk dan rumahtangga di Kabupaten Indragiri Hulu tersebar pada 14 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah rumahtangga terbanyak terdapat di Kecamatan Siberida, Kecamatan Rengat Barat dan Kecamatan Rengat. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit adalah Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Sungai Lala, dan Kecamatan Kuala Cenaku.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data mengenai jenis kelamin, umur responden, dan tingkat pendidikan, Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan, Kepala Sekolah SDN 004 Belilas, Bendahara BOS, Guru dan Wali Murid yang terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki – laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam menanggapi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan bisa dilihat pada tabel V.1 berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	5	71%
2	Perempuan	2	29%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah informan penelitian jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki adalah 5 orang dengan persentase 71%, dan untuk jenis kelamin perempuan adalah 2 orang atau sama dengan jumlah persentase 29%, dari keseluruhan responden yang diwawancara berjumlah 7 orang.

2. Usia Informan

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang harus dan tidak dilakukan. Usia merupakan faktor yang sangat baik pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas – tugas yang diberikan, selain itu usia juga berpengaruh pada produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain – lain. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel V.2

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Umur

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 40	2	29%
2	40 – 50	3	42%
4	>50	2	29%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata – rata usia informan berkisar antara 40 sampai dengan 50 tahun, hal ini dilihat dari jumlah informan yaitu 3 orang dari 7 orang informan dengan persentase 42%. Informan yang berusia kurang dari 40 berjumlah 2 orang dengan persentase 29%. Sedangkan yang berumur lebih dari 50 berjumlah 2 orang dengan persentase 29%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola fikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan

tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan – tahapan baik dari keluarga (non-formal), lingkungan (non-formal), maupun sekolah (formal). Adapun tingkat pendidikan informan pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA sederajat	2	29%
2	Strata 1	4	57%
3	Strata 2	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data olahan penulis 2022

Dari data diatas diketahui bahwa untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu pendidikan SMA sederajat yang berjumlah 2 orang dengan persentase 29%, Strata 1 adalah 4 orang dengan persentase 57% dan pendidikan strata 2 adalah 1 orang dengan persentase 14%.

5.2. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (Sagala, 2006). Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut,

maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat Pendidikan Dasar (SD) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anak-anak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Keadaan tersebut tentu harus di perbaiki agar hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.

Sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung juga kurang memadai sehingga untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia sangatlah sulit. Pendidikan di Indonesia terbelakang termasuk yang terbelakang di banding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Dilihat dari sarana dan prasarana

saja pendidikan di Indonesia sangat tertinggal. Baik dari segi bangunan dan fasilitas yang mendukung pendidikan. Bahkan bangunan sekolah yang ada di daerah pedalaman Indonesia bisa di bilang seadanya saja. Tenaga pendidikannya pun masih ada yang sukarela dan belum professional. Apalagi fasilitas yang mendukung pendidikan masih kurang dari apa yang diharapkan. Bagaimana pendidikan di Indonesia mau maju kalau sarana dan prasarananya masih seadanya seperti itu.

Pada tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak lagi ditarik iuran sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah. Salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah melaksanakan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hulu merupakan suatu Organisasi Pemerintahan yang bergerak di Bidang Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pendidikan dan Pengajaran Tingkat Dasar, Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Formal dan Non Formal, Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan merupakan hal sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu Negara. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses Pendidikan, dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, disamping itu memiliki budi pekerti luhur dan moral yang baik, peningkatan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat membangun dan memajukan Bangsa dan Negara agar tercapai masyarakat yang berilmu, cerdas dan berkerakter. Pendidikan merupakan investasi besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu indikator penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD & SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2013).

Program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan khusus untuk membebaskan pungutan meringankan beban masyarakat dan BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin yang putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis dan biaya lainnya.

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikansi dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 Pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan

orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke Kabupaten/Kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke Provinsi selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online pada tahun 2012. Dana BOS dari rekening Satker Provinsi di lembaga penyaluran yang ditunjuk dikirimkan ke rekening sekolah penerima BOS sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Provinsi dengan lembaga penyalur tersebut.

Dana BOS adalah program pemerintahan yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain, dan dana BOS ini dikelola langsung oleh Sekolah karena dana BOS ini ditransfer dari Dinas Pendidikan Provinsi ke Sekolah secara online. Dengan BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi Indonesia.

Alur pengelolaan Dana BOS terdiri dari 3 tahap yang nantinya akan bermuara pada satu output yang berupa dampak implementasi pengelolaan dana BOS. Ketiga dampak tersebut antara lain :

1. Perencanaan

- a. Melakukan evaluasi dari sekolah, dengan cara mengisi instrument evaluasi diri terhadap pencapaian 8 SNP dilanjutkan dengan membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

- b. Mengisi dan mengirimkan data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS01B dan BOS-01C) secara lengkap dan akurat yang kemudian dikirimkan secara online.
- c. Membentuk Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah.
- d. Melakukan sosialisasi Juknis BOS kepada warga sekolah dan mengumumkan berapa jumlah dana BOS yang nantinya akan diterima sekolah.
- e. Kepala sekolah bersama guru, komite, dan tim manajemen BOS menyusun draft RKAS.
- f. Mengadakan rapat finalisasi RKAS yang diketahui oleh perwakilan orang tua siswa.
- g. Mengirimkan laporan final RKAS untuk disahkan oleh Unit Pengelola Pendidikan (UPP) setempat.

2. Pelaksanaan

- a. Bendahara mengambil dana BOS yang telah disalurkan ke rekening masing-masing sekolah oleh pemerintah pusat.
- b. Dana BOS dicairkan sesuai kebutuhan sekolah dan tidak boleh diambil langsung seluruhnya.
- c. Penggunaan dana BOS mengacu pada 13 komponen yang terdapat dalam Juknis BOS yang berlaku dan didasarkan pada kesepakatan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite.

- d. Pembelian barang dan jasa dilaksanakan sesuai Juknis BOS dan dicatat dalam formulir inventaris barang.

3. Pelaporan

- a. Menyusun Buku Kas Umum (BOS-K3), Buku Pembantu Kas (BOSK4), Buku Pembantu Bank (BOS-K5), dan Buku Pembantu Pajak (BOS-K6).
- b. Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (BOS-K7) dan Rekapitulasi Penggunaan Tiap Sumber Dana (BOSK7a).
- c. Menyerahkan laporan BOS Triwulan ke UPP Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- d. Sekolah mengirimkam laporan penggunaan dana BOS secara online melalui website Kemendikbud (laporan BOS online).
- e. Sekolah mempunyai bukti pengeluaran dana (SPJ) yang sah dan akurat, dan juga mempunyai bukti setoran pajak.
- f. Sekolah melaporkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat melalui papan informasi dan surat edaran yang diberikan kepada orang tua siswa.

Pengelolaan pendanaan yang baik dengan adanya dukungan manajemen pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha perbaikan pengelolaan Dana BOS dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima Dana Bantuan, Kas atau Dana adalah urusan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar di sekolah. Kas merupakan aktiva yang paling likuit, paling mudah dipindahkan dana relative mudah terjadi resiko penyelewengan. Kas juga merupakan suatu alat pembayaran yang sah dan mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi,

sehingga paling sering dijadikan sasaran penyelewengan pencurian terhadap kas tersebut.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD, baik negeri maupun swasta diseluruh Provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya yaitu sebesar 800.000,-/Peserta didik pertahun.

Dengan penyaluran dana bantuan operasional sekolah, sekolah wajib membebaskan biaya pendidikan siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orang tua menjadi ringan, BOS diarahkan agar bisa meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya BOS diharapkan mampu memfasilitasi rakyat yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Dengan adanya BOS fasilitas sekolah seharusnya juga menjadi perhatian, karena pendidikan tidak hanya membutuhkan teori saja tetapi juga diperlukan praktek untuk menunjang ketrampilan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Dilihat dari aspek fisik masih banyak gedung atau bangunan sekolah yang masih kurang layak pakai dan luput dari perhatian pemerintah. Apalah arti sekolah gratis kalau fasilitas sekolah sangat minimalis, tenaga pendidik kualitasnya rendah atau tidak profesional dan mutu pendidikannya rendah. Akan tetapi tidak hanya dari aspek fisik saja yang perlu diperhatikan tetapi dari aspek mental juga perlu diperhatikan. Kita sering lupa bahwa pembangunan mental juga diperlukan agar pendidikan tidak hanya berjalan di tempat

saja, agar dapat mengentaskan masyarakat dari kebodohan selama ini. Kita jangan hanya mengedepankan aspek fisik saja tetapi dari segi mental juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Melihat realita tersebut, pemerintah mencoba meminimalisir berbagai bentuk kesenjangan yang mungkin terjadi dengan berusaha merealisasikan pengalokasian dana APBN sebesar 20% untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk dialihkan pengalokasiannya dalam bentuk kompensasi pun dilaksanakan. Salah satunya alokasi pada sektor pendidikan dengan pengadaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyaluran dana BOS tersebut dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi yang disalurkan melalui rekening sekolah, dan penyaluran dana BOS tersebut melalui data penerima dana BOS yang dikirim dari sekolah ke Tim Manajemen Kabupaten untuk dikirim ke Tim Manajemen Provinsi sesuai data yang akurat.

Program BOS diamanatkan pemerintah guna mewujudkan pendidikan murah bahkan gratis. Namun dalam implementasinya pemerintah masih terlihat kurang serius, hal ini tergambar dari petunjuk pelaksanaan yang diedarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terkesan membuka peluang atau kesempatan bagi sekolah untuk tetap melakukan pemungutan terhadap orang tua siswa. Untuk lebih jelas mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, diuraikan berdasarkan pendekatan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Kemudian informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang

berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang diikuti oleh Wahab (2014:77), komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang diikuti oleh Wahab (2014:77) bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn yang diikuti oleh Wahab, 2014:77).

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah

yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut (Sugiyono, 2005 : 49). Oleh sebab itu, komunikasi harus mempunyai unsur :

- a. Ketetapan komunikasi dengan pelaksana.
- b. Konstan/keseragaman.
- c. Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas.
- d. Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat.
- e. Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka kerjakan.
- f. Komunikasi membutuhkan keakuratan.
- g. Implementasi ini tidak hanya diterima, namun mereka harus juga jalan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
- h. Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.
- i. Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total atau distorsi komunikasi.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Komunikasi yang ditetapkan dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Berikut ini tanggapan dari Ibu Asmawati, S.Hum selaku Kepala Sekolah SDN 004 Belilas berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022 menyatakan bahwa :

“Semua pelaksanaan program BOS dari awal sampai akhir, memang harus berdasarkan petunjuk teknis BOS tahun 2017 tanpa adanya petunjuk teknis sebagai panduan kami akan mengalami kesulitan dalam implementasi program BOS. Dari awal sampai membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran BOS harus berdasarkan petunjuk teknik BOS terbaru”.

Berdasarkan tanggapan ibu Asmawai, S.Hum selaku Kepala Sekolah SDN 004 Belilas menyatakan bahwa Semua pelaksanaan program BOS dari awal sampai akhir, memang harus berdasarkan petunjuk teknis BOS tahun 2017 tanpa adanya petunjuk teknis sebagai panduan kami akan mengalami kesulitan dalam implementasi program BOS. Dari awal sampai membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran BOS harus berdasarkan petunjuk teknik BOS terbaru. Tanggapan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Helfinayeti, S.Pd selaku Bendahara BOS menyatakan bahwa :

“Tentu saja, pelaksanaan program BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis BOS terbaru, yaitu tahun 2017. Dari mulai penetapan alokasi dana BOS sampai pertanggung jawaban penggunaan anggaran.”

Begitu juga dengan tanggapan bapak Zaenuddin, S.Pd menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, memang sangat diperlukan sosialisasi dan bimtek, karena setiap tahun mekanisme penggunaan dana BOS selalu mengalami perubahan, tanpa ada sosialisasi maka kebijakan penggunaan dana BOS tidak akan berjalan dengan baik.”

Berikut juga uraian hasil wawancara dengan salah satu guru yang mengerti tentang pengelolaan Dana BOS, bapak Abd Muis Repelita, S.Pd yang menyatakan bahwa :

“Ada sosialisasi melalui Bimtek, dengan bimtek sosialisasi kepada setiap sekolah yang dilaksanakan secara rutin diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan penggunaan dana BOS”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru di SDN 004 Belilas diketahui dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, memang sangat diperlukan sosialisasi dan bimtek, karena setiap tahun mekanisme penggunaan dana BOS selalu mengalami perubahan, tanpa ada sosialisasi maka kebijakan penggunaan dana BOS tidak akan berjalan dengan baik.

Hasil wawancara tersebut berbanding terbalik dengan hasil wawancara dari wali murid bapak Rahmat Syukron yang menyatakan bahwa : *“Secara pribadi saya tidak pernah mengetahui mengenai anggaran dana BOS yang kami ketahui anak kami tidak dipungut biaya disekolahnya”*

Sedangkan menurut tanggapan Bapak Noprizal, menyatakan bahwa : *“Kami tidak pernah mengikuti rapat ataupun sosialisasi mengenai penggunaan dana BOS serta tidak pernah terlibat dalam perumusan kebijakan yang melibatkan dana BOS tersebut”*.

Bapak Suryadi, selaku wali murid juga menambahkan : *“Tidak ada sosialisasi yang diberikan dalam penggunaan dana BOS di SDN 004 Belilas ini”*.

Berdasarkan tanggapan dari wali murid diketahui bahwa sebagian besar wali murid tidak pernah menerima sosialisasi mengenai penggunaan dana BOS dan tidak mengetahui pengelolaan serta tujuan dari penggunaan dana BOS di SDN 004 Belilas.

Hasil tanggapan dari informan tersebut diperkuat dengan tanggapan Kepala Sekolah sebelumnya yaitu ibu Darminingsih, S.Pd yang menyatakan bahwa :

“Tentu tidak, dalam pengelolaan dana BOS murni menjadi tanggung jawab sekolah, jadi saya rasa tidak perlu di sampaikan kepada wali murid, kami

hanya berkoordinasi dengan komite dan juga dinas terkait dalam pengelolaan dana BOS ini”.

Dari wawancara dengan ibu Darminingsih selaku mantan kepala sekolah SDN 4 Belilas diketahui dalam pengelolaan dana bos, tidak seharusnya disosialisasikan kepada wali murid, karena pengelolaan dana bos murni menjadi tanggung jawab sekolah saja dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai indikator komunikasi dapat disimpulkan bahwa implementasi dana BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan sudah berjalan dengan baik, adanya petunjuk teknis BOS yang disebarakan ke setiap sekolah dan semua sekolah sudah memilikinya, pelaksanaan sosialisasi melalui Bintek pengelolaan BOS yang dilakukan secara rutin dan pemberian dana BOS ke sekolah dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis namun belum adanya sosialisasi mengenai penggunaan dana BOS kepada wali murid di SDN 004 Belilas.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat

digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber Daya ini mencakup Sumber Daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan

kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu: “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang

dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Sumber daya yang ditetapkan dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Berikut ini tanggapan dari ibu Asmawati, S.Hum selaku Kepala Sekolah SDN 004 Belilas berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022 menyatakan bahwa :

“Ya tentu saja, SK Bendahara BOS diberikan kepada guru yang diberikan tugas tambahan dan ini sudah sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan BOS, Tim BOS sekolah dibentuk berdasarkan struktur yang terdapat pada juknis BOS terdiri dari penanggung jawab, bendahara, komite sekolah dan orang tua, ditambah sebagai penanggung jawab pendataan dan semua itu memiliki SK sebagai acuan pelaksanaan tugasnya”.

Berdasarkan tanggapan ibu Asmawati, S.Hum selaku Kepala Sekolah SDN 004 Belilas menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana BOS, semua tim yang terlibat dalam struktur pengelolaan dana BOS sudah diberikan SK sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya dan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tanggapan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ibu Helfinayeti, S.Pd selaku Bendahara BOS menyatakan bahwa :

“Benar, saya ditunjuk kepala sekolah melalui SK menjadi bendahara BOS terhitung tahun pelajaran 2017/2018, saya merasa sebagai bendahara BOS, dengan kemampuan dimiliki dan latar belakang pendidikan bukan dari administrasi dan keuangan tentu sangat menghambat dalam mengelola dana BOS tetapi dengan pengalaman beberapa tahun mengelola BOS dan mengikuti Bintek saya bisa mengelola dana BOS sesuai dengan harapan.”

Begitu juga dengan tanggapan Bapak Zaenudin, S.Pd. menyatakan bahwa :

“Setau saya memang diberikan SK khusus oleh kepala sekolah sebagai tim pengelola BOS disekolah ini.”

Berikut juga uraian hasil wawancara dengan ssalah satu guru yang mengerti tentang pengelolaan Dana BOS, bapak Abd Muis Repelita, S.Pd yang menyatakan bahwa :

“Pengelola BOS diberikan SK sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tambahan disamping menjalankan tugas keseharian sebagai tenaga pendidik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru di SDN 004 Belilas diketahui dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, setiap tim yang dibentuk dalam pengelolaan dana BOS diberikan SK sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Menurut analisa peneliti bahwa petugas yang memperoleh SK adalah mereka yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan sekolah, dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa petugas yang diberi tugas sebagai pengelola BOS adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola BOS dengan latar belakang keguruan, sehingga kemampuan dalam mengelola administrasi dan keuangan belum sepenuhnya memiliki pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan.

Hasil tanggapan dari informan tersebut diperkuat dengan tanggapan Kepala Sekolah sebelumnya yaitu ibu Darminingsih, S.Pd yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya, pengelola BOS telah diberikan amanah untuk mengelola keuangan BOS tersebut, namun sebaiknya diberikan kepada Bendahara yang benar – benar memahami mengenai masalah keuangan, atau minimal pemerintah kabupaten memberikan pelatihan kepada bendahara BOS sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam membuat BOS tersebut”.

Berdasarkan tanggapan kepala sekolah lama diketahui bahwa seharusnya pengelolaan dana BOS diberikan secara khusus untuk dikelola oleh tata usaha bagian keuangan atau bendahara sekolah, namun dikarenakan keterbatasan sumber daya pada tata usaha yang berstatus PNS, maka dalam pengelolaannya dimintakan kepada salah satu guru di SDN 4 Belilas, sehingga seharusnya pemerintah memberikan pelatihan mengenai pengelolaan dana BOS kepada pengelola, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan.

Jumlah dana BOS yang sampai ke sekolah seringkali tidak sesuai dengan rencana anggaran dan pedoman BOS yang sudah di usulkan, dikarenakan selalu ada saja pengeluaran diluar rencana dan mengharuskan membeli keperluan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan dalam proses penyerahan dana BOS sudah sesuai dengan pedoman BOS walaupun pencairannya selalu tidak tepat waktu. Semua pelaksanaan program BOS sudah diawasi oleh para pengawas baik dari tingkat pusat, provinsi maupun oleh Kabupaten / Kota. Tidak semua sekolah memiliki petugas yang memperoleh SK pengelola BOS adalah mereka yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah, karena semua pengelola adalah guru yang diberi tugas tambahan dengan latar belakang akademik sebagai pendidik. Namun semua petugas pengelola BOS sudah mengetahui apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dengan jelas.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat terbanteng dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber

daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya financial dan sumber daya waktu. Ketiga sumber daya ini akan saling mendukung dalam implementasi sebuah kebijakan.

Pengelolaan pendanaan yang baik dengan adanya dukungan manajemen pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha perbaikan pengelolaan Dana BOS dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima Dana Bantuan, Kas atau Dana adalah urusan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar di sekolah. Kas merupakan aktiva yang paling likuit, paling mudah dipindahkan dana relative mudah terjadi resiko penyelewengan. Kas juga merupakan suatu alat pembayaran yang sah dan mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga paling sering dijadikan sasaran penyelewengan pencurian terhadap kas tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan di biayai oleh dana BOS.

BOS diperuntukan setiap sekolah di Indonesia bertujuan untuk mengatasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun. Kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan dana BOS rawan terjadi penyelewengan dan

ketidakefektifan manajemen dana BOS. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan seluruh siswa SD dan SMP dari biaya operasi sekolah,
2. Membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan apapun baik di sekolah negeri maupun swasta, dan
3. Meringankan biaya operasional sekolah terutama bagi sekolah swasta (Dirjen Pendidikan Dasar tentang Petunjuk Teknis BOS tahun 2015:3).

Agar dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat terpakai secara efektif dan efisien maka perlu adanya manajemen atau pengelolaan yang baik. Menurut Ismaya (2015:2) manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana dalam manajemen keuangan pada umumnya, kegiatan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, atau pengendalian.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Disposisi yang ditetapkan dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Berikut ini tanggapan dari ibu Asmawati, S.Hum selaku Kepala Sekolah SDN 004 Belilas berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022 menyatakan bahwa :

“Tentu saja, pemerintah selalu berkomitmen bahwa dana BOS sebagai wujud program sekolah gratis dilaksanakan harus berdasarkan pedoman BOS, karena sudah komitmen pemerintah bahwa dana BOS harus dilaksanakan berdasarkan pedoman BOS yang sudah diberikan kepada semua sekolah penerima dana BOS”.

Berdasarkan tanggapan ibu Asmawati, S.Hum selaku Kepala Sekolah SDN 004 Belilas menyatakan bahwa Semua pelaksanaan program BOS dari awal sampai akhir, memang harus berdasarkan petunjuk teknis BOS tahun 2017 tanpa adanya petunjuk teknis sebagai panduan kami akan mengalami kesulitan dalam implementasi program BOS. Dari awal sampai membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran BOS harus berdasarkan petunjuk teknik BOS terbaru. Tanggapan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ibu Helfinayeti, S.Pd selaku Bendahara BOS menyatakan bahwa :

“Pemerintah selalu berkomitmen bahwa dana BOS harus dan wajib dilaksanakan sesuai pedoman BOS tanpa adanya penyimpangan.”

Begitu juga dengan tanggapan Bapak Zaenudin, S.Pd menyatakan bahwa :

“Semua kegiatan harus memiliki pedoman oleh karena itu program BOS yang merupakan wujud sekolah gratis yang diprogramkan pemerintah harus sepenuhnya berdasarkan pedoman BOS yang sudah ditetapkan pemerintah.”

Berikut juga uraian hasil wawancara dengan salah satu guru yang mengerti tentang pengelolaan Dana BOS, bapak Abd Muis Repelita, S.Pd yang menyatakan bahwa :

“Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran dana BOS harus sesuai dengan pedoman yang telah diberikan dikarenakan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilaksanakan dinas mengenai penggunaan dana BOS tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru di SDN 004 Belilas diketahui dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan dikarenakan dalam penggunaannya selalu disertai dengan monitoring dan evaluasi rutin oleh pemerintah melalui dinas terkait untuk mengurangi kecurangan dalam penggunaan dana BOS tersebut. Berdasarkan hasil analisa peneliti mengenai indikator disposisi diketahui bahwa pemerintah sepenuhnya sudah berkomitmen menyediakan dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan pedoman BOS, para pengelola BOS sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Program BOS sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat, kegiatan monitoring dan evaluasi dari pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan oleh dinas bersamaan dengan laporan pertanggung jawaban BOS oleh sekolah ke dinas terkait dan juknis insentif yang diperoleh oleh pelaksana kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS sudah tercantum dalam juknis BOS.

Berikut juga diuraikan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Syukron selaku wali murid yang menyatakan bahwa : *“Alhamdulillah sejak adanya BOS orang tua merasa sangat terbantu dalam hal biaya sekolah anak”*.

Sedangkan menurut tanggapan Bapak Noprizal, menyatakan bahwa : *“Dengan adanya program BOS semua sekolah tidak boleh mengadakan pungutan kepada orang tua siswa, dan memang tidak terjadi sama sekali dikarenakan semua operasional sekolah sudah ditanggung oleh BOS”*.

Bapak Suryadi, selaku wali murid juga menambahkan : *“Melalui program BOS, sekolah tidak membebani orang tua dengan biaya apapun”*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali murid diketahui bahwa sekolah tidak membenani biaya kepada orang tua / wali murid dan sekolah tidak boleh membenani biaya kepada orang tua murid setelah adanya program BOS.

Hasil tanggapan dari informan tersebut diperkuat dengan tanggapan Kepala Sekolah sebelumnya yaitu ibu Darminingsih, S.Pd yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya dana BOS wali murid tidak diberikan beban biaya dalam bentuk apapun, namun anak – anak mereka tetap diberikan pendidikan yang terbaik dikarenakan semua biaya pendidikan sudah di tanggung oleh pemerintah”.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dahulu diketahui selama diberikannya bantuan pendidikan berupa dana BOS, masyarakat tidak lagi di bebaskan dengan biaya pendidikan namun anak – anak tetap mendapatkan pendidikan terbaik selama di sekolah, hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada prinsipnya progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasaran yaitu siswa-siswi yang berhak atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu peserta didik yang kurang mampu atau tidak mampu. Pemberian dana operasional sekolah yang tidak tepat sarannya sama saja membuang uang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut, masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran BOS.

Dana BOS adalah program pemerintahan yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain, dan dana BOS ini dikelola langsung oleh Sekolah karena dana BOS ini ditransfer dari Dinas Pendidikan Provinsi ke Sekolah secara online. Dengan BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi Indonesia.

Dengan melihat tujuan dari pemberian dana BOS adalah peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka perlu diketahui berapa besar peranan yang ditimbulkan dengan adanya dana bos bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri ini. Mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk

itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating), inimenjadi pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidakaktifan birokrasi. Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (AG Subarsono, 2005 : 8).

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas

melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Struktur Birokrasi yang ditetapkan dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Berikut ini tanggapan dari Ibu Asmawati, S.Hum selaku Kepala Sekolah SDN 004 Belilas berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2022 menyatakan bahwa :

“Semua pelaksanaan program BOS dari awal sampai akhir, memang harus berdasarkan petunjuk teknis BOS tahun 2017 tanpa adanya petunjuk teknis sebagai panduan kami akan mengalami kesulitan dalam implementasi program BOS. Dari awal sampai membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran BOS harus berdasarkan petunjuk teknik BOS terbaru”.

Berdasarkan tanggapan Ibu Asmawati, S.Hum selaku Kepala Sekolah SDN 004 Belilas menyatakan bahwa Semua pelaksanaan program BOS dari awal sampai akhir, memang harus berdasarkan petunjuk teknis BOS tahun 2017 tanpa adanya petunjuk teknis sebagai panduan kami akan mengalami kesulitan dalam implementasi program BOS. Dari awal sampai membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran BOS harus berdasarkan petunjuk teknik BOS terbaru. Tanggapan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ibu Helfinayeti, S.Pd selaku Bendahara BOS menyatakan bahwa :

“Tentu saja, pelaksanaan program BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis BOS terbaru, yaitu tahun 2017. Dari mulai penetapan alokasi dana BOS sampai pertanggung jawaban penggunaan anggaran.”

Begitu juga dengan tanggapan Bapak Zaenudin, S.Pd menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, memang sangat diperlukan sosialisasi dan bimtek, karena setiap tahun mekanisme penggunaan dana BOS selalu mengalami perubahan, tanpa ada sosialisasi maka kebijakan penggunaan dana BOS tidak akan berjalan dengan baik.”

Berikut juga uraian hasil wawancara dengan salah satu guru yang mengerti tentang pengelolaan Dana BOS, bapak Abd Muis Repelita, S.Pd yang menyatakan bahwa :

“Ada sosialisasi melalui Bimtek, dengan bimtek sosialisasi kepada setiap sekolah yang dilaksanakan secara rutin diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan penggunaan dana BOS”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru di SDN 004 Belilas diketahui dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, memang sangat diperlukan sosialisasi dan bimtek, karena setiap tahun mekanisme penggunaan dana BOS selalu mengalami perubahan, tanpa ada sosialisasi maka kebijakan penggunaan dana BOS tidak akan berjalan dengan baik. Hasil analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa semua sekolah tiap jenjang sudah memiliki penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui dana BOS, sudah ada mekanisme penyaluran dana BOS untuk sekolah gratis sesuai dengan juknis BOS, sudah ada pedoman dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan juknis BOS dan semua sekolah memiliki dokumen pelaporan penggunaan BOS ke berbagai pihak baik triwulan maupun tahunan.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdasarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, Dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

tersebut, dana di prioritaskan untuk kebutuhan operasional nonpersonalia, bukan untuk investasi dan bukan untuk kesejahteraan Guru.

Hasil penelitian sesuai dengan hasil observasi penulis yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS di SDN 004 Belilas sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dalam penggunaan dana BOS ini tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi. Karena dana BOS ini hanya membiayai komponen-komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, perawatan sekolah, pembayaran honorium bulanan guru honorer dan lain sebagainya. Setelah menggunakan dan BOS kemudian langkah berikutnya yaitu membuat pertanggungjawaban. Dalam salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS masing-masing pengelola diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak yang terkait. Secara umum hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan, dan pemanfaatan dana serta pengaduan masalah jika ada.

5.3. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Waktu pencairan dana BOS yang sering tidak tepat waktu tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak
2. Penggunaan dana BOS pada umumnya sudah sesuai dengan juknis dan rencana anggaran yang dibuat sekolah, namun sering terjadi biaya yang tidak terduga sehingga sekolah kewalahan dalam menanggulangi dana tersebut.
3. Adanya campur tangan birokrasi dalam penggunaan dana BOS dengan adanya instrument biaya yang tidak terduga yang harus dibeli sekolah yang ditentukan oleh dinas terkait.
4. Kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan serta pembahasan pada bab bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu belum maksimal.
2. Komunikasi belum maksimal, ditandai dengan wali murid yang masih kurang paham dengan informasi yang disampaikan dalam penyaluran dana BOS yang masih kurang jelas.
3. Sumber daya sudah sesuai dengan prosedur dan diatur dalam pedoman BOS namun dalam sarana dan prasarana pendukung kurang memadai masih dalam proses perbaikan.
4. Disposisi atau Sikap yang sudah sangat baik dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hulu sudah mempunyai maklumat pelayanan sendiri dalam memberikan pelayanan dan sesuai dengan SOP.
5. Struktur birokrasi sudah cukup memadai di tandai dengan pelaksanaan pengelolaan dana BOS dan dalam pemberkasannya semua sudah sesuai dengan prosedur atau SOP.

6. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Dana BOS tersebut seperti : kurang tersedianya waktu yang cukup pada awal pertama kali diluncurkan program BOS pada tahun 2005, kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS, adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak.

6.2. Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan maka dalam hal ini menyarankan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan tertib Administrasi dalam penyusunan RAPBS, hendaknya pihak sekolah melibatkan orang tua murid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dengan beberapa alternatif dapat digunakan. Diantaranya, membuat kotak saran untuk wali murid dalam penyusunan RAPBS sehingga adanya pendapat/partisipasi wali murid dalam penyusunan RAPBS yang digunakan oleh sekolah, jadi wali murid tidak sebagai formalitas saja.
2. Tenaga Kependidikan yang dipercaya dalam mengelola dana bos seharusnya memiliki latar belakang pendidikan ekonomi / akuntansi

sehingga memudahkan dalam membuat SPJ dan laporan dana bos tersebut.

3. Pemerintah setempat diharapkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada bendahara bos agar lebih mudah memahami dan mengelola dana bos tersebut, mengingat masih banyak yang belum memahami dalam pengelolaan dana bos dan masih mengharapkan bantuan dari pihak honorer untuk mengelola, sementara dalam regulasi mewajibkan tenaga kependidikan yang berstatus PNS sebagai pengelola dana bos.
4. Sekolah harus mengelola Dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks itu, sebaiknya sekolah memiliki sistem komunikasi dengan orang tua, masyarakat, dan komite sekolah dalam hal program dan pertanggungjawaban keuangan. Jika mungkin, sekolah dapat membuka website, sehingga dapat memudahkan wali murid/masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan sekolah serta dapat meningkatkan pengetahuan wali murid.
5. Dalam pengelolaan dana bos diharapkan sekolah untuk berpedoman penuh kepada juknis dan regulasi mengenai pengelolaan dana bos yang telah ditetapkan sehingga penggunaan dana bos bisa efektif dan tepat sasaran.
6. Fungsi komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) akan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

serta keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu, komite sekolah bukan lagi sebagai stempel (legalisasi) ditubuh sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. 2009. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Arief. *Budiman, 1995*, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT. Gramedia Pustakan Utama
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1986)*. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia. Indonesia.
- Batinggi, Ahmad (1999)*. Manajerial Pelayanan Umum. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Boediono, 1999*, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE
- Creswell, J. W. 2010*. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT *Pustaka Pelajar*.
- Donni Juni Priansa. 2012. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Alfabeta. Bandung.
- Edwards, Jack E, John C. Scott, and Nambury S. Raju. 2007. Evaluating Human Resources Programs: A 6-Phase Approach for Optimizing Performance. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Gaspersz, Vincent. 1997*. Manajemen Kualitas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Gie, The Liang. 2009*. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Liberty.
- Handyaningrat, Soewarno, 2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Haji Masagung
- Hardiansyah .2011*. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Ibrahim. 2008. Prinsip-Prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: Andi.
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2005). Transferring learning to behavior: Using the four levels to improve performance. San Fransisco: BerrettKoehler Publishers.
- Lijan, Sinambela. 2014 . Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lukman, Sampara. 2001. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan prima. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.

- Lungry, Pramusinto, Agus. 2014. Reformasi, Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta. Gava Media.
- Moenir, 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moenir*. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Moleong*, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Parasuraman. 1990. Delivering Quality Service. New york: The Free. Press.
- Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2014. Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riduwan*. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Rivai*, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rokhmatun, Burhanudin Dwi. 2013. Profesi Kearsipan. Yogyakarta: UGM.
- S.P Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 1999, Restruktur dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Esensial dan Aktual, Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayanti, 2010. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, cetakan kedua, Penerbit : Mandar Maju. Bandung.
- Siagian*, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sinambela*, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono*. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono*. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto dan Burhanuddin. 2015. Teori Perilaku Keorganisasian. Penerbit CAPS, Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana dkk, 1999. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Syafiie. Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.

Zeithaml, V. Parasuraman, A. and L. Berry L. 1985. "Problems and Strategies in Services Marketing". *Jurnal of Marketing* Vol. 49. (Spring).

Dokumen Pendukung :

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.